

KEPENTINGAN MAROKO BERGABUNG KEMBALI DALAM *AFRICAN UNION*

Muh. Ikvi Zainal Wafa¹
NIM. 1302045082

Abstract

Morocco's return to the African Union ended the 33 year absence between Morocco and the regional institution. Morocco's return at 2017 is a surprise thing, since African Union still has not changed its view regarding the Western Sahara Republic (SADR) which triggered its withdrawal from membership in 1984. It is an interesting topic to be researched, by discussing Morocco's interests to rejoin the African Union. This research uses a descriptive method which data are taken from books, journals, websites, and valid news. The author uses theory of national interest, concept of regionalism and the concept of membership in international organizations. The results of this study indicate that the interests of Morocco consist of economic and political interests. Morocco's economic interests are market intensification to increase the economy. Morocco's political interests is to approaching African countries so that Morocco gets support from fellow African Union members regarding a special autonomy proposal for Western Sahara.

Keyword : *Interest, Regionalism, Morocco, African Union, Western Sahara.*

Pendahuluan

Pada 31 Januari 2017, keanggotaan *African Union* (AU) bertambah menjadi 55 negara setelah KTT *African Union* (AU) ke-28 yang diadakan di Addis Ababa memutuskan untuk menerima Maroko sebagai anggota melalui voting dengan 39 dari 54 negara anggota AU mendukung pilihan Maroko untuk kembali sedangkan 9 anggota lainnya menolak. (Mohamed, 2017). Bergabungnya Maroko kembali ke AU melengkapi keanggotaan AU yang kini meliputi seluruh negara di Afrika, sekaligus mengakhiri absensi 33 tahun antara Maroko dan institusi regional tersebut. Bergabungnya Maroko merupakan langkah yang mengejutkan mengingat adanya permasalahan antara Maroko dengan Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) yang masih menjadi anggota AU.

Merujuk pada sejarahnya, Maroko termasuk salah satu negara yang turut mendirikan OAU pada 1963. Namun, keanggotaan Maroko di OAU tersebut terpaksa berakhir setelah Maroko memutuskan keluar dari organisasi tersebut pada 1984. Alasan keluarnya Maroko dari organisasi tersebut saat itu dikarenakan penerimaan Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) menjadi anggota OAU. Bagi Maroko, SADR adalah entitas pemberontak yang merongrong kedaulatan Maroko di Sahara Barat.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : zainalw509@gmail.com

Maroko menganggap wilayah Sahara Barat adalah wilayahnya secara historis. Ketika OAU bertransformasi menjadi AU pada 2002, Maroko tidak menunjukkan minat untuk bergabung (Ankomah, 2002). Sebelum resmi bergabung kembali dengan AU, Maroko menjadi satu-satunya negara di Afrika yang belum bergabung dengan AU. (<http://www.al-monitor.com/pulse/ru/contents/articles/originals/2016/07/morocco-join-african-union-western-sahara-dispute-egypt.html>).

Kerangka Dasar Teori dan Konsep Kepentingan Nasional

Istilah Kepentingan nasional pada awalnya diartikan oleh Hans J. Morgenthau dalam cakupan yang berbeda antara lain kepentingan biasa dan kepentingan konflik, kepentingan primer dan kepentingan sekunder, kepentingan awal, kepentingan kelompok, kepentingan sama dan pengganti, utama, kepentingan resmi, kepentingan yang spesifik dan terbatas, kepentingan material, kepentingan garis keras, kepentingan penting dan tidak tetap. Ketika ditelusuri lebih lanjut terminologi ini dapat diganti menjadi dua kategori umum menjadi kepentingan nasional bangsa yang tunggal dan tingkat kepentingan antara dua negara atau lebih dalam satu komponen yang sama. Dalam kepentingan nasional bangsa yang tunggal dan dapat membedakan kepentingan nasionalnya sesuai dengan 3 tingkat yang pertama yaitu, tingkat kepentingan primer, kemudian tingkat kepentingan permanen dan yang terakhir tingkat kepentingan umum (*general*).

Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Pemikiran Morgenthau mengenai kepentingan nasional didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Morgenthau menyatakan bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional dituntun oleh pengejaran kepentingan nasional, dan kepentingan nasional itu adalah memperoleh, mempertahankan atau memperbesar kekuatan negara.

Arti minimum yang inheren di dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*). Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan minimum negara-bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain. Diterjemahkan dalam pengertian yang lebih spesifik, negara-bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya); mempertahankan rezim ekonomi-politik (yaitu identitas politiknya); serta memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik, dan sejarahnya (yaitu, identitas kulturalnya). Menurutnya, dari tujuan-tujuan umum ini para pemimpin bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik. Misalnya, perlombaan persenjataan, perimbangan kekuatan, pemberian bantuan asing, pembentukan aliansi, atau perang ekonomi dan propaganda.

Donal E. Neuechttlerlin dengan konsep kepentingan nasional mengemukakan bahwa terdapat empat dasar kepentingan yang melandasi hubungan antar kedua negara atau lebih, yaitu :

- a. Kepentingan Ekonomi (*Economic Interest*), yaitu suatu kepentingan pemerintah didalam meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.
- b. Kepentingan Tata Internasional (*World Order Interest*), yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya.
- c. Kepentingan Pertahanan (*Military Interest*), yaitu adanya kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain.
- d. Kepentingan Ideologi (*Ideology Interest*), yaitu suatu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Dari penjelasan 4 Konsep kepentingan nasional diatas, kembali masuknya Maroko kedalam *African Union* termasuk dalam kepentingan ekonomi dan kepentingan tata internasional (Kepentingan Politik) yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan sehingga mempermudah Maroko dalam perluasan pengaruh ekonominya di kawasan Afrika dan meraih kepentingannya dalam penyelesaian sengketa Sahara Barat.

Regionalisme

Region/kawasan dapat diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kekuatan secara geografis. Selain itu juga negara-negara tersebut memiliki kemiripan sosiokultural. Secara politik terdapat kemiripan politik seperti yang tercermin dalam organisasi internasional.

Selain itu banyaknya masalah yang dihadapi oleh negara-negara di dunia baik negara industri maupun negara berkembang memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Jika negara-negara industri memiliki masalah seperti pengungsi, terorisme ataupun masalah imigran seperti yang terjadi di kebanyakan negara-negara Eropa, maka negara berkembang memiliki permasalahan seperti jumlah penduduk dan tingkat pengangguran, masalah dengan birokrasi dan sistem politik serta masalah seperti pertumbuhan ekonomi.

Hal-hal yang dapat diatasi untuk menyelesaikan masalah tadi adalah melakukan kerjasama untuk mengatasi hal tersebut. Mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tiap negara tentunya tidak hanya bisa dilakukan oleh perjanjian bilateral dan masalah yang dihadapi tiap negara pun berbeda beda karena itu harus ada lembaga atau kerjasama antar pemerintah dalam mengatur pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Oleh karena itu maka munculah regionalisme.

Regionalisme merujuk pada suatu proses pertumbuhan integrasi kemasyarakatan dalam suatu wilayah. Proses ini bersifat alami dimana negara-negara yang bertetangga dengan sendirinya melakukan serangkaian kerjasama guna memenuhi kebutuhan negara tersebut.

Dengan membentuk suatu organisasi regional atau menjadi anggota organisasi regional, negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional. Negara-negara tersebut melakukan distribusi kekuasaan di antara mereka untuk mencapai tujuan bersama.

Integrasi internasional adalah suatu proses pencapaian kondisi supranasional di mana urusan yang semula ditangani pemerintah nasional beralih ke unit-unit politik yang lebih besar. Dengan kata lain integrasi Internasional merupakan proses dimana aktor-aktor politik nasional dari berbagai negara diminta mengarahkan loyalitas, harapan, dan kegiatan politik mereka ke instansi pusat yang lebih besar, yang lembaga-lembaganya memiliki atau mengambil alih yuridiksi yang semula berada ditangan negara bangsa.

African Union sebagai induk regionalisme di Afrika, mempunyai beberapa kewenangan untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan memperkuat hubungan antara negara-negara anggotanya, *African Union* memiliki departemen yang mengurus masalah ekonomi yang dinamakan Departemen Perdagangan dan Industri untuk mendukung AU dalam meningkatkan perdagangan intra-Afrika, pembentukan jalur cepat dari *African Continental Free Trade Area (ACFTA)* serta untuk memastikan daya saing Afrika dalam ekonomi global.

Keanggotaan dalam Organisasi Internasional

Pengertian organisasi internasional dikodifikasi dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian Antar Negara dan Organisasi Internasional. Dalam konvensi ini di definisikan bahwa organisasi internasional merupakan suatu organisasi antar pemerintah.

Dalam praktiknya, prinsip keanggotaan suatu organisasi internasional tergantung pada maksud dan tujuan organisasi, fungsi yang akan dilaksanakan dan perkembangan apakah yang diharapkan dari organisasi internasional tersebut.

Prinsip keanggotaan dapat dibedakan antara prinsip universalitas dan terbatas (*selective*). Prinsip keanggotaan universalitas tidak membedakan sistem pemerintahan, ekonomi ataupun politik yang dianut oleh negara anggota.

Sedangkan dalam prinsip terbatas ini, ditekankan syarat-syarat tertentu bagi keanggotaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Keanggotaan didasarkan pada pendekatan letak geografis. Namun pengertian kedekatan geografis ini kadang-kadang tidak hanya didasarkan pada kedekatan geografis semata, namun sering juga didasarkan pada pertimbangan politis. Contohnya, NATO.
- b) Keanggotaan yang didasarkan pada kepentingan yang akan dicapai. Contohnya, *Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)*.
- c) Keanggotaan yang didasarkan pada sistem pemerintahan tertentu atau pada sistem ekonomi. Contohnya, *Council for Mutual Economic Assistance (COMECON)*.

- d) Keanggotaan yang didasarkan pada persamaan kebudayaan, agama, etnis, dan pengalaman sejarah. Contohnya, *British Commonwealth*.
- e) Keanggotaan yang didasarkan pada penerapan hak-hak asasi manusia. Contohnya, *Council of Europe*.

Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu memberikan gambaran melalui data dan fakta-fakta yang ada tentang kepentingan Maroko bergabung kembali dalam *African Union*, Serta teknik analisa data yang digunakan penulis adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*), dimana penulis melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, baik buku, literatur, serta referensi-referensi lain yang kiranya dapat mendukung penulisan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif dengan metode konten analisis, yaitu analisis isi yang bersumber dari berita, media cetak, internet, dan lainnya.

Hasil Penelitian

Keanggotaan Maroko dalam OAU/African Union

Pada tahun 1956 saat kemerdekaan Maroko diumumkan, Maroko masih berada dalam kondisi yang belum stabil baik dari segi politik, ekonomi, dan keamanan. Dalam keadaan yang baru saja merdeka, Maroko membutuhkan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diperoleh dari dalam negeri sendiri dan juga dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepentingan nasionalnya, tujuan lain Maroko bergabung dengan organisasi seperti OAU ataupun kerja sama lainnya adalah untuk menunjukkan keberadaannya di dunia internasional serta diakui sebagai negara yang merdeka. Oleh karena itu, Maroko menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, baik dalam bentuk bilateral, multilateral, maupun melalui organisasi internasional, sejak memproklamasikan kemerdekaannya. Salah satu diantara berbagai kerjasama dan hubungan yang dilakukan Maroko adalah kerjasama dan hubungan dengan OAU. Maroko bergabung dengan OAU pada tanggal 25 Mei 1963 bersamaan dengan tanggal berdirinya OAU.

1. Pembentukan OAU

Organization of African Unity (OAU) merupakan hasil dari beberapa konferensi regional Afrika dengan tujuan mendukung rakyat Afrika yang masih berada di bawah penjajahan agar sepenuhnya terbebas dari kolonialisme bangsa Eropa.

Konferensi-konferensi tersebut diadakan di ibukota negara Afrika yang telah merdeka yakni di Accra, Ghana pada tahun 1958 dan Addis Ababa, Ethiopia pada tahun 1960. Dalam hal ini, terdapat dua tujuan utama yang terlihat semakin mendapat perhatian dari negara-negara Afrika. Pertama, kebutuhan untuk mengkonsolidasikan kerjasama antar negara-negara Afrika untuk mencapai kesatuan. Kedua, kebutuhan negara-negara Afrika untuk menemukan

cara dan sarana membebaskan Afrika agar sepenuhnya merdeka dari kolonialisme.

Pertemuan pertama kali diadakan di Accra, Ghana pada 1958 yang digagas oleh Presiden Ghana, Kwame Nkrumah. Pertemuan tersebut dihadiri oleh delapan negara yang telah merdeka saat itu yakni Maroko, Mesir, Ghana, Sudan, Libya, Tunisia, Liberia dan Ethiopia. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk bertukar pandangan mengenai hal-hal yang umum serta mengeksplorasi cara dalam mengkonsolidasikan dan menjaga kemerdekaan negara, memperkuat ekonomi dan hubungan budaya antar negara, membantu sesama bangsa Afrika yang masih berada penjajahan serta menjaga perdamaian di dunia. Pertemuan inilah yang menjadi titik awal munculnya semangat Pan-Africanisme untuk melawan penjajahan di Afrika.

Namun, pada tahun 1961 mulai muncul perbedaan pandangan mengenai proses penyatuan Afrika diantara dua blok, yakni Blok Monrovia dan Blok Casablanca. Kelompok Monrovia memilih untuk menyatukan Afrika secara bertahap dengan pendekatan yang lebih fungsional, namun tetap menjunjung kedaulatan negara-negara anggota. Sedangkan kelompok Casablanca yang beranggotakan Maroko, Ghana, Guinea, Mali, Libya, Mesir dan Aljazair menganjurkan pendekatan yang lebih radikal untuk menyatukan Afrika.

Pembentukan blok Casablanca dipelopori oleh Raja Mohammad V dari Maroko pada tahun 1961. Pertemuan ini berlangsung di kota Casablanca, Maroko dan dihadiri oleh Presiden Ghana, Guinea, Mali, Republik Arab bersatu (Mesir dan Suriah) dan Menteri Luar Negeri Libya. Pertemuan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan negara-negara Afrika atas krisis yang terjadi di Kongo pada saat itu dan membicarakan pembentukan komando militer. Dalam pidatonya, Raja Maroko menyebutkan beberapa hal yang harus dibicarakan selama pertemuan, diantaranya pembentukan sebuah Majelis Konsultatif Afrika dan komite untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi, budaya dan militer di Afrika.

Pembentukan Majelis Konsultatif Afrika tersebut dibentuk berdasarkan prinsip penghapusan kolonialisme, peleburan segregasi rasial, pembatasan percobaan nuklir dan intervensi asing dalam urusan Afrika, penegasan kembali netralitas Afrika, konsolidasi dan pertahanan bagi negara-negara Afrika yang baru merdeka, membangun persatuan Afrika dan tindakannya untuk mengkonsolidasikan perdamaian dunia. Hasil dari pertemuan ini adalah lahirnya Piagam Casablanca yang menyatakan beberapa hal dalam mengatur pembebasan Afrika dari kolonialisme dan pembentukan Majelis Konsultatif Afrika yang permanen. Piagam tersebut ditandatangani oleh Raja Maroko, Presiden Ghana, Guinea, Mali, dan Republik Arab Bersatu.

Sementara itu, berbeda dengan kelompok Casablanca. Kelompok Monrovia juga berupaya menyatukan Afrika dengan mengadakan konferensi tandingan pada 1961 di kota Monrovia. Konferensi ini diprakarsai oleh negara Kamerun, Liberia, Nigeria, dan Togo. Pertemuan ini membahas empat topik utama, yaitu

cara atau sarana untuk mencapai pemahaman dan kerja sama serta cara yang lebih baik dalam mempromosikan persatuan di Afrika, serta kemungkinan kontribusi negara-negara Afrika terhadap perdamaian dunia. Pertemuan ini menyepakati penyatuan Afrika yang menjunjung prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara-negara merdeka, kesetaraan politik bagi semua negara Afrika merdeka dan menghormati integritas teritorial semua negara Afrika.

Sebagai lanjutan dari pertemuan yang diadakan di Monrovia, pertemuan kedua diselenggarakan pada tahun 1962 di Lagos, Nigeria. Dalam pertemuan ini kelompok Monrovia berusaha merangkul kelompok Casablanca dengan mengundangnya untuk hadir dan menyatukan pandangan terkait permasalahan di Afrika, namun pada saat itu negara-negara yang tergabung dalam kelompok Casablanca menolak untuk menghadiri konferensi tersebut. Meskipun demikian, konferensi tersebut menghasilkan Piagam Lagos tentang pembentukan kerjasama diantara negara-negara Afrika.

Barulah pada pertemuan ketiga yang diadakan di Addis Ababa pada tanggal 23 Mei 1963, para Menteri Luar Negeri negara-negara Afrika menyetujui beberapa agenda termasuk pembentukan Organization of African Unity (OAU). Pertemuan ini dihadiri oleh kedua kelompok yakni kelompok Monrovia dan kelompok Casablanca yang kemudian sepakat untuk membuat organisasi regional di kawasan Afrika. Pembentukan organisasi regional tersebut didasari dengan piagam OAU dan struktur yang permanen. OAU diharapkan mampu menjadi forum yang akan memfasilitasi kerjasama di bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dekolonisasi, diskriminasi ras dan apartheid serta hubungan antara Afrika dan PBB. Ethiopia menjadi negara yang pertama kali membuat draft mengenai pembentukan organisasi bagi negara-negara Afrika.

2. Keterlibatan OAU dalam konflik Maroko-Sahara Barat

Sahara Barat merupakan wilayah gurun seluas 266.000 kilometer persegi yang terletak di barat laut Afrika. Sahara Barat berbatasan dengan Maroko di utara, Aljazair di timur laut, Mauritania di timur dan selatan, dan Samudera Atlantik di barat. Populasi Sahara Barat mencapai 600.000, dengan 40% tinggal di El-Aaiun (CIA, 2018). Sahara Barat dipisahkan oleh tembok pasir sepanjang 2700 km, yang membatasi wilayah Sahara Barat yang dikuasai Maroko dan Polisario. Meski berstatus sebagai non-self-governing territory, sekitar 80% wilayah Sahara Barat dikuasai Maroko dan sisanya dikuasai Polisario.

Sebelum konflik, wilayah Sahara Barat dikuasai Spanyol pada akhir abad ke-19 sebagai hasil Perjanjian Berlin. Seiring dengan maraknya dekolonisasi di wilayah Afrika lain, Sahara Barat dijadikan sebagai non-self governing territory oleh PBB. Konflik baru dimulai setelah wilayah Sahara Barat dibagi kepada Maroko dan Mauritania oleh Spanyol berdasarkan Perjanjian Madrid pada 14 November 1975, yang memicu ketidakpuasan dari Polisario dan membuat Polisario menyatakan perang terhadap Maroko dan Mauritania. Mauritania menyerah pada 7 Agustus 1979, sehingga menyisakan Polisario dan Maroko sebagai pihak yang berperang. Perang antara keduanya baru selesai pada 1991,

seiring dengan ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata yang digagas oleh OAU dan PBB, *OAU Settlement Plan 1988* (Omar, 2012).

Sebagai gerakan perlawanan terhadap kolonialisasi baru, Polisario mendapatkan dukungan dari sebagian besar negara-negara Afrika, terutama dari Aljazair dan Libya. Kedua negara tersebut mendukung agar Polisario dapat masuk sebagai anggota OAU. Aljazair melakukan lobi-lobi intensif dalam OAU agar negara-negara OAU mendukung SADR. Pada 1982, SADR telah diakui oleh setidaknya 35 negara, yang semuanya didasarkan persamaan nasib dengan SADR (Naldi, 1982: 152). Hal ini menjadikan SADR tinggal menunggu waktu untuk diterima sebagai anggota OAU, mengingat mekanisme penerimaan anggota OAU menggunakan sistem simple majority.

Dalam pertemuan Dewan Menteri OAU pada Februari 1982 di Addis Ababa, Sekjen OAU, Edem Kodjo, membuat langkah dengan mengundang perwakilan SADR yang resmi menjadikan SADR sebagai anggota OAU. Masuknya SADR melalui jalur yang tidak biasa ini mengundang protes dari Maroko, yang memboikot KTT OAU ke-19 di Tripoli pada Agustus 1982. Boikot yang dilakukan Maroko dan 18 negara OAU lainnya tersebut berhasil menggagalkan diadakannya KTT, namun tidak berhasil mengubah pendirian OAU terkait penerimaan SADR. Tidak ada perkembangan berarti sampai KTT ke-20 di Addis Ababa pada 12 November 1984, yang mana delegasi SADR hadir untuk pertama kali dalam KTT OAU. Delegasi Maroko menyatakan ketidakpuasannya dan keengganannya duduk bersama delegasi SADR, yang berujung pada walk out dan menandai keluarnya Maroko dari OAU (Hasnaoui, 2017: 8).

Keluarnya Maroko dari OAU nyatanya tidak memberikan perubahan berarti dalam dinamika konflik. OAU/AU terus menjaga agar konflik Sahara Barat tetap menjadi isu di Afrika. AU masih mengusahakan cara-cara diplomatik untuk menjamin hak masyarakat Sahrawi akan *self-determination*. AU mendorong PBB agar menetapkan referendum dan memberikan mekanisme perlindungan HAM terhadap MINURSO, pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di Sahara Barat. Pada Juni 2014, AU mengangkat Joaquim Chissano sebagai Utusan Khusus AU terhadap Sahara Barat, yang bertugas memberikan perkembangan di Sahara Barat kepada PSC dan Komisi AU sekaligus mempromosikan *self-determination* masyarakat Sahrawi dalam pertemuan dengan DK PBB. Selain itu, AU juga mengecam eksploitasi Sahara Barat oleh Maroko yang dinilai melanggar hukum internasional.

Posisi OAU/AU yang konsisten mendukung SADR menjadikan Maroko menolak keterlibatan OAU/AU dalam penyelesaian konflik Sahara Barat. Pernyataan awal terkait penolakan ini disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Maroko, Abdellatif Fillali, yang menganggap OAU tidak lagi ada (Pazzanita, 2006: 26). OAU/AU dinilai tidak netral karena terang-terangan mendukung SADR dan menggunakan kampanye untuk menyerang posisi Maroko. Omar Hilale, Duta Besar Maroko untuk PBB, dalam suratnya kepada Sekjen dan DK PBB, menyatakan bahwa:

“The credibility of the African Union on the issue of the Moroccan Sahara is compromised given its position, which prejudged, in a biased manner, the outcome of the political negotiations under the auspices of the United Nations, by admitting, within its membership, an entity that has on attribute of sovereignty” (Sahara Question, 2016).

Tindakan AU yang terlalu berpihak tersebut dinilai bertentangan dengan usaha-usaha PBB untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Karena itu, AU dianggap tidak memiliki kredibilitas dalam menyelesaikan konflik. Meski Maroko bergabung dengan AU, namun tidak serta-merta menjadikan Maroko menyetujui keterlibatan AU dalam penyelesaian konflik tersebut. Maroko menginginkan agar AU mengambil posisi netral guna mencapai kontribusi yang konstruktif (Mohammed VI, 2016a).

Hubungan Maroko dengan negara-negara Afrika

Keluarnya Maroko dari keanggotaan OAU tidak serta merta mempengaruhi hubungannya dengan negara-negara Afrika meskipun pada awalnya sempat menimbulkan ketidak harmonisan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan ikatan sejarah, budaya dan geografis yang dimiliki Maroko dengan negara-negara Afrika terbilang cukup lama. Identitas kerajaan Maroko memiliki pengaruh dari Afrika dan Maghribi, Muslim, Arab dan Berber serta dengan banyak pengaruh etnis dan daerah lainnya. Maroko juga terikat secara historis maupun kontemporer dengan Eropa dan dunia. Setelah merdeka dari pemerintahan kolonial Prancis dan Spanyol pada tahun 1956, Maroko mulai merajut kembali hubungannya dengan negara-negara Afrika. Keterlibatan Maroko pada awalnya didorong oleh keinginan untuk membantu negara-negara Afrika yang masih terjajah untuk mencapai kemerdekaan mereka dengan memberikan dukungan kepada gerakan pembebasan dan mendukung perjuangan mereka di kalangan internasional.

Meskipun Maroko telah keluar dari keanggotaan OAU, namun hubungannya dengan negara-negara Sub-Sahara dan keterlibatan dalam masalah keamanan dan pembangunan benua tersebut tidak berhenti. Maroko memiliki ikatan hubungan yang telah lama dan baik dengan sejumlah negara di Afrika Barat seperti Gabon, Senegal, dan Pantai Gading. Selain itu terdapat ikatan budaya dan perdagangan yang telah berlangsung lama dengan negara-negara tetangganya di Afrika Barat.

Kebijakan Maroko di Afrika Barat ini menjadi strategi geopolitik Maroko dimana infrastruktur baru dapat membuka peluang bagi pembangunan ekonomi, dengan Maroko sebagai pusat integrasi dan perdagangan di kawasan ini.

Tidak hanya eksistensi di kawasan, Maroko juga berpartisipasi dalam banyak konferensi dan pertemuan mengenai benua Afrika di tingkat PBB, Uni Eropa (UE), dan Afrika. Maroko memainkan peran aktif dalam memulai dialog yang terjadi antara negara-negara Afrika dan Uni Eropa mengenai migrasi serta pembangunan di tahun 2006, dialog ini dikenal sebagai *Rabat Process*. Selain itu, Maroko bergabung dengan organisasi Pan-Afrika lainnya untuk mempromosikan kerja sama regional dalam berbagai isu, seperti Konferensi Tingkat Menteri dalam kerjasama bidang perikanan antara negara-negara Afrika. Lebih lanjut, Maroko juga bergabung dalam

Komunitas Sahel-Sahara (CEN-SAD) pada bulan Februari 2001. CEN-SAD dipelopori oleh Muammar Qadhafi dari Libya sebagai wahana bagi benua Afrika untuk memberikan pengaruh regional dan internasional. Setelah jatuhnya Qadhafi, Maroko mulai mendorong kebangkitan organisasi tersebut, salah satunya adalah pengesahan revisi perjanjian CEN-SAD, dimana Maroko didukung oleh otoritas Libya yang baru.²

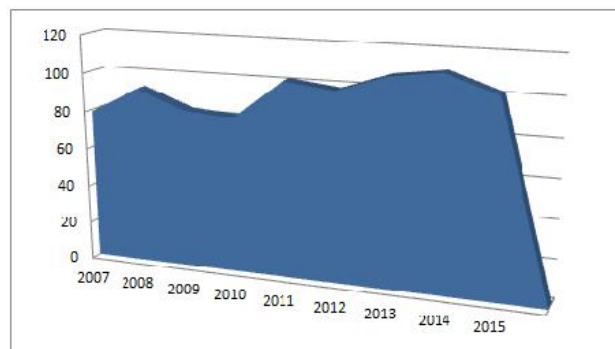
Pada tingkat bilateral, Maroko memiliki hubungan dengan sejumlah pemimpin di Afrika Barat. Kongo adalah salah satu sekutu terdekat Maroko di Afrika. Tidak hanya itu, Raja Hassan II dari Maroko dan Presiden Gabon Hadj Omar Bongo Ondimba telah menempe hubungan baik sejak lama sehingga berkembang menjadi hubungan yang lebih erat antara kedua negara. Presiden Gabon adalah salah satu pendukung utama kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Hubungan erat kedua pemimpin tersebut berlanjut di bawah penerus mereka, Raja Mohammed VI dari Maroko dan Presiden Ali Bongo Ondimba yang merupakan Presiden Gabon saat ini. Selain itu, hubungan Maroko dengan Guinea juga terus berlanjut sejak tahun 1970 an.

Gambaran Kondisi Perekonomian Maroko

Pada awal 1990-an negara-negara di kawasan Afrika yang merupakan mitra dagang Maroko memiliki iklim perdagangan dan investasi kurang baik yang diakibatkan masih banyaknya konflik dan perang yang terjadi di kawasan tersebut, sehingga Raja Hassan II memunculkan kebijakan luar negeri untuk lebih mendekatkan diri dengan Uni Eropa yang memiliki lingkungan perdagangan yang lebih baik.

Dalam perkembangannya intensitas perdagangan Maroko dengan Uni Eropa terus meningkat hingga mencapai lebih dari 60% dari keseluruhan ekspor Maroko mengalir ke negara-negara di Uni Eropa dengan nilai \$ 22 Miliar, dengan Perancis dan Spanyol sebagai penerima terbesar barang-barang Maroko. Sementara untuk perdagangan ke Kawasan Afrika hanya mencapai 8,8% dari total ekspor keseluruhan Maroko. Ketergantungan yang berlebihan terhadap pasar Eropa mengakibatkan Maroko mengalami kejenuhan pasar pasca krisis global pada akhir tahun 2008, dimana data tahun 2009 menunjukkan bahwa ekonomi Maroko terkena dampak perlambatan ekonomi global, seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.1 Pertumbuhan GDP Maroko Tahun 2007-2015



Sumber : World Bank

Berdasarkan data diatas, perolehan GDP Maroko mengalami penurunan pada tahun 2009. GDP Maroko pada tahun 2009 sebesar US\$ 82,897 Miliar mengalami penurunan dari periode sebelumnya yaitu US\$ 92,507 Miliar. Hal ini disebabkan melambatnya permintaan pasar pada hasil pertanian, dari pertumbuhan 7,4% pada kuartal ketiga 2009 menjadi 3,1% pada periode yang sama pada tahun 2009. Selain itu permintaan pupuk mineral campuran dan fosfat yang merupakan salah satu pendorong perekonomian Maroko, berada dalam tren yang menurun, dari pertumbuhan 9,5% menjadi 5,2% pada tahun 2009. Permintaan pada ekspor mobil ke Uni Eropa juga mengalami penurunan 2,4%. (<https://www.ceicdata.com/en/indicator/morocco/sluggish-performance>).

Dalam meredam dampak krisis global, Maroko mengeluarkan kebijakan pengencangan permintaan domestik dan kebijakan *South-south cooperation* dimana kebijakan ini bertujuan menggali serta mengintensifkan perdagangan dan investasi di kawasan Afrika. Kawasan Afrika dulunya dikenal sebagai kawasan yang kurang stabil dan sering terjadi konflik, namun saat ini Afrika menjelma menjadi kawasan yang lebih bersahabat baik dalam iklim bisnis maupun investasi, sehingga mendorong beberapa negara di dunia termasuk Maroko untuk mulai meningkatkan volume perdagangan dan menanamkan modal di kawasan Afrika. Dalam mencapai peningkatan perdagangan dan investasi dibutuhkan kesepakatan antar mitra dagang, dalam hal ini seperti PTA, FTA, maupun lainnya.

Maroko percaya hubungannya dengan Afrika sub-Sahara masih jauh berada di bawah potensi terbaiknya. Saat ini Afrika sub-Sahara hanya mewakili 3,3 % dari total arus perdagangan Maroko. Rendahnya arus perdagangan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya infrastruktur transportasi yang efisien di seluruh wilayah, diversifikasi Maroko yang tidak memadai dari produksi ekspornya, dan adaptasi negara yang tidak lengkap terhadap permintaan Afrika sub-Sahara. Masih belum lengkapnya kerangka hukum yang efektif dan komprehensif, dan tingginya tingkat proteksionisme di antara negara-negara sub-Sahara juga patut disalahkan. Selain itu, Maroko juga harus mempertimbangkan pesaing internasional yang kuat seperti Cina, Brazil dan Amerika yang semakin tertarik pada pasar Afrika yang tumbuh cepat.

Kesediaan untuk mengatasi masalah-masalah perdagangan baru-baru ini membawa Maroko memasuki fase ketiga strategi ekonominya di Afrika, yaitu meningkatkan integrasi regional yang lebih dalam di Afrika Barat (dengan meningkatkan status menjadi anggota tetap ECOWAS yang dimulai dengan masuknya Maroko sebagai anggota AU) dan Tengah. Aplikasi Masyarakat Ekonomi Maroko dari Negara-negara Afrika Barat juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kebijakan ekonomi sub-Sahara dalam konteks global yang berubah yang ditandai oleh kelesuan ekonomi Eropa, kerawanan energi, dan ketidakstabilan politik.

Upaya Maroko bergabung kembali dalam African Union

Maroko di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI berupaya memperkuat kerjasama ekonomi, budaya, sosial dan keagamaan serta komitmen terhadap benua Afrika. Raja Mohammed VI menyadari adanya fakta bahwa 33 tahun memboikot AU telah gagal karena SADR tetap menjadi anggota AU dan berada dalam posisi baik.

Raja Mohammed VI menggunakan kekuatan Maroko sebagai negara *Arabophone* dan *Francophone* untuk melobi dengan gigih negara-negara anggota Uni Afrika.

Salah satu upaya Maroko adalah dengan melakukan kunjungan resmi ke lebih dari tiga puluh lima negara-negara Afrika sejak tahun 2000. Dalam kunjungan ini menghasilkan lebih dari 500 perjanjian bilateral di bidang perdagangan, promosi investasi, infrastruktur dan transportasi serta kerjasama terkait dengan pengembangan sumber daya manusia.

Pada tahun 2015 Maroko dan negara-negara sub-sahara mulai mengaplikasikan beberapa kemitraan publik dan swasta yang telah disepakati sejak tahun 2013. Pada tahun 2016, Bank milik Maroko mulai menguasai 9% pangsa pasar Afrika, hal ini menjadikan Maroko menempati posisi ke 3 dalam hal jasa keuangan Afrika. Di sisi lain Maroc Telecom yang merupakan perusahaan telekomunikasi Maroko juga memiliki pondasi yang kuat dengan menguasai pangsa pasar di negara-negara Trans-Sahel seperti Pantai Gading, Mali, Senegal, Kamerun, Gabon, dan juga di Afrika bagian selatan serta di Angola dan Burundi.

Keterlibatan politik Maroko terhadap benua Afrika yang berawal dari beberapa sektor yang vital dan strategis ini kemudian menyadarkan banyak negara Afrika, khususnya negara-negara Sub-Sahara dan negara yang berada di kawasan Sahel menyerukan Maroko sebagai pemain utama di sektor ekonomi dan sosial, Maroko dianggap sebagai negara yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang penting.

Melalui diplomasi yang diawali kerjasama ekonomi, kunjungan kenegaraan tahunan ke negara-negara Afrika serta promosi melalui diplomat dan menteri-menteri dalam setiap pertemuan bilateral dengan negara-negara Afrika, Maroko berusaha mempererat hubungan dengan negara-negara Afrika. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *lobby* Maroko dalam kembalinya ke dalam keanggotaan African Union dengan suara mayoritas anggota AU. Beberapa upaya tersebut diawali dari pendekatan Maroko ke negara-negara anggota African Union. Hal ini dimulai dari kunjungan Raja Mohammed VI ke beberapa negara di Afrika Barat seperti Mali, Senegal, Cote d'Ivoire, dan Gabon pada tahun 2013, lalu pada tahun 2014 Raja kembali mengunjungi Mali, Cote d'Ivoire, Gabon dan Guinea. Pada tahun 2016 Menlu Maroko mengunjungi Senegal, Côte d'Ivoire, Kamerun, Mesir, Ethiopia, Libya, Sudan, dan Tunisia untuk membangun dukungan dan mempererat hubungan bilateral Maroko, upaya-upaya pendekatan Maroko melalui kunjungan diplomatik Maroko berhasil memperoleh dukungan dari beberapa negara yang paling berpengaruh Afrika Barat dan Afrika Tengah.

Ketika Maroko merasa telah memiliki cukup dukungan anggota AU, akhirnya Maroko mengirimkan surat resmi ke African Union Summit di Kigali, Rwanda pada 17 Juli tahun 2016 yang berisi deklarasi resmi Raja Mohammed VI terkait keinginan bergabung kembali ke dalam African Union. Merespon hal ini African Union melalui ketuanya Idris Deby yang merupakan Presiden Chad, menyambut baik permintaan Maroko untuk masuk kembali ke dalam keanggotaan AU. Dalam hal ini AU mengabulkan permintaan Maroko dengan mengadakan pertemuan kepala negara Afrika di Addis Ababa, Ethiopia pada 31 Januari 2017 untuk membahas keinginan

Maroko untuk kembali bergabung ke dalam organisasi. Pertemuan ini menghasilkan kemenangan voting bagi Maroko setelah 39 dari 54 anggota Uni Afrika mendukung Maroko untuk kembali ke dalam keanggotaan sedangkan 9 anggota lainnya menolak. Masuknya Maroko ke dalam keanggotaan AU menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian anggota AU, khususnya bagi anggota yang mendukung SADR seperti Aljazair dan Afrika Selatan. Hal ini memang kekhawatiran yang wajar dimana kembalinya Maroko ke dalam AU, sarat dengan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi yang dimilikinya.

Kepentingan Maroko untuk bergabung kembali ke dalam AU

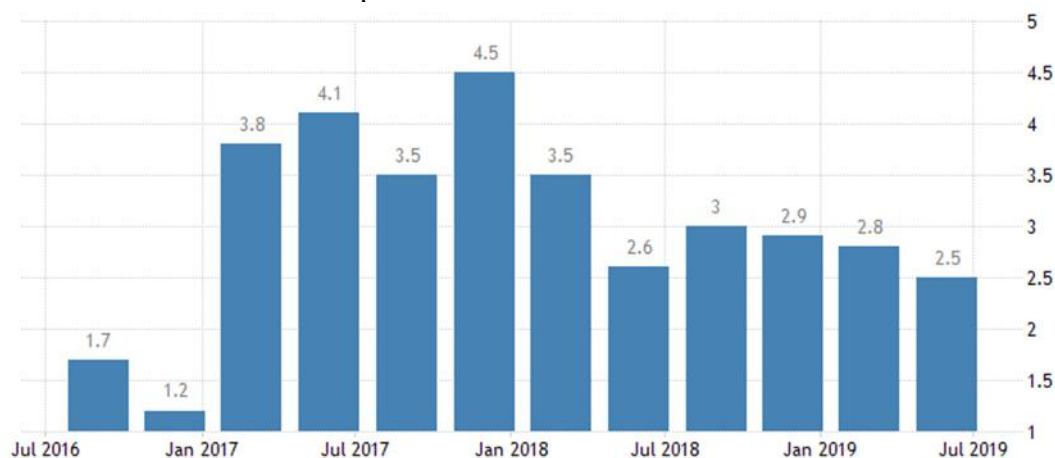
1. Kepentingan Ekonomi Maroko

Untuk meningkatkan perekonomian, Maroko terus berupaya menyediakan lahan atau lingkungan perdagangan yang baik dan stabil. Agar perusahaan-perusahaan Maroko mampu bersaing dalam perdagangan global. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem perdagangan bebas, Maroko melihat bahwa *African Union* merupakan peluang besar bagi tumbuh dan berkembangnya perdagangan Maroko, oleh karena itu kembalinya Maroko ke dalam *African Union* memiliki kepentingan ekonomi yakni ekspansi pasar untuk meningkatkan perekonomian.

Bergabungnya Maroko ke dalam African Union memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Maroko. Pertumbuhan ekonomi atau *economic growth* diartikan sebagai jumlah pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan *output* dalam periode tertentu, biasanya dalam periode satu tahun. Artinya pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.

Pertumbuhan Ekonomi Maroko dapat diukur dengan melihat pendapatan nasional Maroko sebelum dan sesudah masuknya ke dalam *African Union*. Pendapatan nasional menyajikan output keseluruhan akan barang dan jasa di suatu negara. Berikut adalah pendapatan nasional Maroko :

Gambar 4. 1 Pendapatan Nasional Maroko Tahun 2016-2019



Sumber : Tradingeconomics.com

Berdasarkan data diatas dapat diartikan bahwa negara Maroko mengalami peningkatan pendapatan nasional setelah masuk ke dalam AU. Untuk melihat

pertumbuhan pendapatan nasional Maroko dapat dilihat dengan membandingkan pendapatan nasional Maroko pada tahun-tahun sebelumnya, dari data diatas, dapat terlihat peningkatan pendapatan nasional terjadi secara signifikan yaitu mulai tahun 2017. Pendapatan nasional pada tahun 2017 sebesar US\$ 109,709 Miliar meningkat tajam dari periode sebelumnya yaitu tahun 2016 yang hanya sebesar US\$ 103,346 Miliar. Dari rentang tahun 2016-2019 pendapatan nasional Maroko berada pada puncaknya pada tahun 2014. Dimana pendapatan nasional Maroko mencapai angka US\$ 118,534 Miliar. Dengan adanya peningkatan pendapatan nasional ini menandakan adanya peningkatan pendapatan output secara keseluruhan.

Salah satu penyebab dari pertumbuhan ekonomi Maroko yang terus menunjukkan ke arah positif adalah kemampuan Maroko untuk menyerap investasi asing. Kondisi politik domestik yang relatif stabil dengan sistem monarki konstitusional, ditambah dengan berkembangnya kebijakan ekonomi Maroko ke arah keterbukaan, membuat banyak negara menanamkan modalnya ke negara ini. Pada 1988 misalnya Prancis melakukan investasi dengan jumlah modal asing yang ditanamkan di Maroko hanya 2 milyar US\$. Namun, tiga belas tahun kemudian, pada 2001 angka itu telah meningkat lebih dari 21 milyar US\$. (https://theodora.com/wfbcurrent/morocco/morocco_economy.html).

2. *Kepentingan Politik Maroko*

Kepentingan Politik Maroko dalam kembalinya ke dalam keanggotaan *African Union* sebagai anggota ke-55 yaitu untuk memudahkan Maroko dalam upayanya terkait penyelesaian sengketa Sahara Barat sebagai salah satu wilayahnya, mengingat pasca keluarnya Maroko penyelesaian konflik dan sengketa Maroko-Sahara Barat masih menemui jalan buntu.

Sejak keluarnya Maroko dari keanggotaan OAU pada tahun 1984 hingga saat ini berbagai solusi yang ditawarkan pada kasus Sahara Barat masih belum menemukan titik terang dikarenakan kedua negara yang bersengketa tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing, dimana Maroko berkeinginan wilayah Sahara Barat menjadi wilayah pemerintahan sendiri yang berada dibawah kedaulatan Maroko sedangkan SADR menginginkan Sahara Barat memperoleh kemerdekaan penuh atas wilayahnya dengan berdiri menjadi sebuah negara baru.

Sejumlah kerjasama dibidang ekonomi berhasil menempatkan Maroko menjadi salah satu negara yang kuat di wilayah Afrika. Dengan masuknya ke dalam AU, kini Maroko memiliki pertumbuhan ekonomi dan pengaruh yang cukup kuat dikawasan. Kerjasama bilateral maupun multilateral serta bantuan yang diberikan Maroko ke negara-negara Afrika Barat tentu menumbuhkan rasa percaya diri bagi Maroko dan hal ini menjadi alat untuk *seeking to control and shape* lingkungan kawasan Afrika. Hal ini memberikan kesan bahwa Maroko adalah negara yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang besar, dimana Maroko memiliki integrasi dengan pembangunan benua Afrika serta siap untuk memainkan peran utama (pemimpin) di masa depan dan hal itu akan membuat Uni Afrika lebih kuat.

Kontribusi Maroko di benua Afrika tersebut memberikan *power* berupa pengaruh di dalam keanggotaan Uni Afrika sehingga nantinya akan digunakan untuk mengumpulkan dukungan dari negara-negara sekutu tradisional dan *francophone* di dalam Uni Afrika yang kemudian digunakan Maroko untuk berusaha memiliki hak suara untuk mengeluarkan SADR dari Uni Afrika. Hal ini karena Maroko menganggap bisa melobi negara-negara Afrika dari dalam Uni Afrika daripada di luar ketika tidak menjadi anggota Uni Afrika.

Melalui akses, ekonomi yang meningkat dan pengaruh yang diperoleh dalam AU, Maroko dapat menggunakan PSC untuk memblokir segala isu sensitif mengenai Sahara Barat di AU, termasuk menggunakan AU sebagai instrumen untuk mengarahkan kembali posisi AU agar netral dan mendukung PBB menciptakan resolusi konflik yang konstruktif.

Selain itu yang didapatkan Maroko adalah peluang untuk melakukan delegitimasi terhadap ide-ide yang mendukung Sahara Barat dalam AU, dengan merangkul negara-negara yang mengakui SADR. Dengan menerapkan pola diplomasi yang sama dalam AU, maka posisi SADR semakin terpojok. Terlebih, 28 negara telah menyatakan agar AU segera mengeluarkan keanggotaan SADR, meski Konstitusi AU tidak memiliki mekanisme pengeluaran anggota. Namun, apabila dua pertiga anggota mengajukan amandemen terhadap Konstitusi AU, maka bukan tidak mungkin Maroko dapat mewujudkan pengeluaran SADR dari keanggotaan AU.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa kepentingan Maroko bergabung kembali dengan AU dikarenakan adanya kepentingan ekonomi dan politik yang ingin dicapai oleh Maroko. Kepentingan di bidang ekonomi yakni untuk meningkatkan perekonomian Maroko dengan memperbesar volume perdagangan di kawasan Afrika melalui intensifikasi perdagangan.

Sementara kepentingan Maroko dalam bidang politik yakni melalui akses, ekonomi yang meningkat dan pengaruh yang diperoleh dapat digunakan untuk mempertahankan posisinya di wilayah Sahara Barat. Selain itu hal ini juga memudahkan Maroko dalam menggalang dukungan untuk mengeluarkan SADR dari *African Union* dan mempertahankan klaimnya atas wilayah Sahara Barat serta perlunya memperkuat jaringan aliansi regionalnya di wilayah Afrika dalam menyelesaikan isu keamanan wilayah.

Daftar Pustaka

Buku

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.

Rossenau, N. James. *International Politics and Foreign Policy Revised Edition A Reader in Research and Theory*, The Free Press, New York, 1969.

Suryokusumo, Sumaryo. *Organisasi Internasional* Cet. 1. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1987.

Jurnal

African Development Bank. *Analysis of Morocco's Trade Policy Volume 2: Impact of Morocco's Tariff Policy on its Position as a Hub for the Rest of Africa*, 1998.

Arifin, "Faktor-Faktor Keterlibatan Aljazair dalam Konflik Maroko-Sahara Barat pada tahun 2000-2013", terdapat di repository.umy.ac.id/handle/123456789/8653.

CSIS African Notes, *Where Does the OAU Go From Here ?*, A publication of the African Studies Program of The Georgetown University Center for Strategic and International Studies, 1982.

Erica Mumford, *The African Union's Role in Western Sahara's Claim of Independence*, Maghreb Center Studies, 2017.

Ministry of Economy and Finance, *A Perspective on Morocco's Relations with Sub-Saharan African Countries*, Kingdom of Morocco, 2008.

Neuechterlein, E Donal. *The Concept Of International interest*, A Time For New Approach, *Orbis: A Journal Of World Affair*, No. 1, 1979.

Percy Street London, Briefing Paper : *Africa's Economic Crisis*, Overseas Development Institute, 1982.

Saleh M. Nsouli. *Resilience and Growth Through Sustained Adjustment: The Moroccan Experience*, International Monetary Fund, 1995.

Media Online

Morocco asks to rejoin the African Union after 32 years tersedia dalam <http://www.aljazeera.com/news/2016/07/morocco-asks-rejoin-african-union-32-years-160718060858072.html>. diakses pada 18 Mei 2017.

Peran penting regionalisme dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan asia tenggara tersedia dalam <http://fkmhii.com/2016/11/10/peran-penting-regionalisme-dalam-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi-di-kawasan-asia-tenggara-studi-mengenai-integrasi-ekonomi-masyarakat-ekonomi-asean-2015/> diakses pada 29 September.

Full text of king Mohammed's speech on the 42 anniversary of Green March tersedia dalam <https://www.morocoworldnews.com/2017/11/233192/full-text-of-king-mohammed-vis-speech-on-the-42nd-anniversary-of-green-march/> diakses pada 26 Februari 2018.

Morocco's ambitious investments in Sub-Saharan Africa full of risks and rewards tersedia dalam <http://globalriskinsights.com/2017/05/morocco-continues-to-invest-in-sub-saharan-africa/>. diakses pada 20 September 2019.